

# PERAN SERTA BISNIS DALAM APEC: KERJA SAMA BISNIS MELALUI APB-NET

*Dr. A. J. Sujadi \**

## **Pengantar**

Pada tanggal 23-25 Agustus yang lalu di Jakarta telah diadakan pertemuan pertama APB-Network sejak organisasi ini didirikan beberapa bulan yang lalu. Pada salah satu pertemuan Kelompok Kerja APEC, pihak swasta yang sebelumnya telah mengadakan prakarsa sendiri untuk membentuk suatu jaringan bisnis di Asia Pasifik telah diikutsertakan. Jaringan bisnis ini diberi nama Asia Pacific Business Network (APBNet).

Kurang lebih 130 peserta dari berbagai negara Asia Pasifik telah mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bersama Kamar Dagang Australia. Para peserta mewakili lembaga-lembaga kamar dagang atau sebagai perorangan, umumnya dari perusahaan besar. Pertemuan ini telah mendapatkan sambutan baik dari pemerintah dengan turut sertanya instansi-instansi seperti Deplu, Depdag, BKPM dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, bahkan Perdana Menteri Australia telah memberikan sambutan tertulis dan Menteri Sumber Daya Alam memberikan sambutan dalam bentuk rekaman.

Tulisan ini melaporkan berbagai masalah yang dibahas dalam pertemuan tersebut serta hasil yang akan dijadikan masukan bagi Sidang APEC dalam bulan November yang akan datang.

## **APB-Net: pembentukan dan operasinya**

Pada waktu ini "jaringan" (*network*) sedang menjadi mode, yang sebenarnya di kalangan bisnis, kerja dalam jaringan ini telah lama diterapkan. Dengan berkembang pesatnya perangkat keras yang dapat mendukung kerja tersebut (bahkan akan

dijadikan "jalan raya informasi") sehingga setiap peminat dapat turut serta dalam lalu lintas ini, dan juga pengembangan perangkat lunak seperti *data base* dan sebagainya, maka kemampuan kerja jaringan (*networking*) dapat dilipatgandakan. Di lain pihak pengertian "kerja sama ekonomi" juga telah mempunyai arti penting dalam dunia bisnis, sehingga menambah kinerja perangkat lunak kerja jaringan. Kerja sama ekonomi dapat berarti konsultasi sampai pada suatu pembentukan aliansi antar-bisnis untuk berpangsa dalam membeli lisensi, penelitian dan sebagainya. Di tingkat pemerintah dapat sampai berarti harmonisasi kebijakan. Peluang-peluang baru telah muncul bagi dunia bisnis untuk dimanfaatkan. Nada yang menunjukkan adanya kecurigaan pada kepentingan-kepentingan yang terselubung masih terasa, sehingga terbentuk lembaga-lembaga baru yang memberikan kesan adanya tumpang tindih dalam menyambut era yang banyak diharapkan ini. Jaringan bisnis sudah ada di wilayah ini, APEC juga menunjuk wakil-wakil bisnis untuk memberikan masukan-masukan, organisasi pemerintah-bisnis-akademisi Asia Pasifik juga sudah ada, yang masing-masing ingin memberikan isi bagi kerja sama ekonomi di masa-masa yang akan datang (Lampiran tulisan ini mencantumkan berbagai lembaga tersebut). APBNet yang diprakarsai pembentukannya oleh masyarakat bisnis yang menghadiri Sidang Kelompok Kerja APEC yang membahas Promosi Perdagangan, merupakan sebuah forum, dengan model ASEAN Business Forum. Interaksi antarbisnis dalam forum di bawah payung APEC ini diharapkan dapat meningkat dan dilandasi semangat kerja sama karena adanya saling percaya, dalam menangani berbagai masalah dan isu. Cara kerja yang

dipilih adalah suatu jaringan dan tidak membentuk suatu organisasi terstruktur, sekalipun dipikirkan adanya beberapa pusat informasi bisnis.

Ketua Panitia penyelenggara dalam upacara pembukaan pertemuan mengharapkan agar APBNet dapat menemukan cara kerja yang efektif sebagai penghubung jutaan sektor usaha kecil dan menengah, yang merupakan penggerak utama perkembangan APEC di masa datang.

Perdana Menteri Keating mengharapkan masyarakat bisnis dapat mengenali dan mengkomunikasikan prioritas-prioritasnya dalam APEC. Di samping itu, peningkatan jaringan bisnis dengan bisnis diharapkan dapat memperluas usaha bersama, yang juga merupakan dasar keberhasilan ekonomi di wilayah ini.

Presiden Kamar Dagang Australia mengharapkan lebih besarnya "keterbukaan" dan masing-masing negara tidak mengatur sendiri-sendiri. Untuk itu jaringan dapat membantu mempelajari latar belakang masalah yang dihadapi oleh para anggota jaringan, sehingga dicapai jalan keluar yang lebih baik.

Meninves, yang membuka Pertemuan APBNet ini, mengharapkan agar kerja sama APEC dipusatkan pada perluasan perdagangan dan investasi. APBNet dapat meningkatkan penyebaran informasi mengenai peluang-peluang tersebut serta mendorong pertumbuhan melalui saling percaya yang lebih besar dan saling pengertian antaranggota.

APBNet dalam rencana kerjanya mencantumkan kegiatan-kegiatan yang berupa: komunikasi (elektronik maupun nonelektronik), kegiatan-kegiatan yang mempertemukan bisnis, serta kegiatan-kegiatan fasilitasi perdagangan (membantu

mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi kalangan bisnis). Peningkatan interaksi antarbisnis juga diusahakan dapat mengembangkan potensi sektor usaha kecil dan menengah.

### Berbagai Masalah yang Dibahas

Dalam Sidang pertama, Panitia Penyelenggara memberikan penjelasan tentang tujuan dibentuknya APBNet serta bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dikemukakannya bahwa salah satu di antaranya adalah untuk mendukung keberhasilan Sidang APEC di Bogor yang akan datang ini. Dijelaskan pula, kegiatan APEC sejak dibentuknya suatu sekretariat pada tahun 1993 sampai sekarang telah membentuk 10 Kelompok Kerja untuk membahas bidang-bidang utama serta beberapa kelompok sementara. Telah dibentuk pula sebuah Kelompok yang terdiri dari Tokoh-tokoh Terkemuka (*Eminent Persons Group*) yang akan menyusun rekomendasi pada Sidang APEC<sup>1</sup>. Keterlibatan bisnis pada APEC berada pada dua tingkat, yaitu tingkat regional dan tingkat domestik. Untuk menjamin bahwa kegiatan APEC relevan bagi masyarakat bisnis serta masyarakat bisnis juga memberikan sumbangannya pada kegiatan APEC, maka bisnis perlu secara langsung dilibatkan. Keterlibatan ini perlu mencerminkan sistem dan gaya hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisnis. Masalah ini telah menjadi kesepakatan para Pemimpin APEC yang bertemu di Seattle tahun lalu. Pengikutsertaan swasta pada kegiatan Kelompok Kerja telah menunjukkan kemajuan ke arah yang positif. Pada tingkat domestik hingga kini masih banyak bersifat menerima informasi dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan kegiatan APBNet ini diharapkan partisipasi swasta dapat ditingkatkan.

Dirjen HELN selaku ketua Sidang Pejabat Senior (SOM) APEC melaporkan perkembangan APEC serta menegaskan bahwa peranan bisnis dalam keberhasilan proses APEC adalah besar. Pengertian yang ditunjukkan dengan pembentukan

PBF di Seattle akan dilanjutkan di Bogor. PBF sendiri pada waktu ini sedang menyelesaikan laporan akhirnya<sup>2</sup>. Organisasi lain yang menjadi peninjau dalam sidang-sidang SOM, baru PECC dan mengharapkan masukan pula dari APBNet<sup>3</sup>.

### Blok Perdagangan dan APEC

APBNet diharapkan dapat menghimpun pendapat kalangan bisnis mengenai apakah inisiatif APEC telah sesuai dari segi cakupan maupun bentuknya, dapat menjelaskan implikasi dan kaitan pengaturan-pengaturan perdagangan pada perekonomian Asia Pasifik serta memberikan arah ke depan pada APEC sebagai kekuatan untuk mengembangkan perdagangan bebas. Berbagai pendapat mengenai dampak blok perdagangan dikemukakan, termasuk apakah APEC ini juga akan menjurus pada suatu blok perdagangan. Pendapat mengenai efektivitas sistem multilateral dibandingkan dengan pengaturan perdagangan regional atau bagaimana menyesuaikan pengaturan-pengaturan yang sudah ada, termasuk bagaimana masalah-masalah yang masih peka dapat dikecualikan, pemikiran bagaimana bisnis pada tingkat perusahaan harus mengantisipasi hari depan dan menghadapi lingkungan yang tidak seragam saat ini, telah dikemukakan dalam Pertemuan ini.

### Promosi Investasi dalam APEC

Masyarakat bisnis melalui APBNet diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat penting bagi manfaat adanya kerangka investasi, serta pengembangannya di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya perjanjian-perjanjian antarbisnis yang telah ada mungkin dapat diterapkan dan dikembangkan di lingkungan APEC. Pendapat-pendapat yang dikemukakan menunjukkan perubahan yang terus terjadi dalam pengaturan investasi di wilayah ini, ada yang spontan, ada yang karena kebijakan (seperti arus modal masuk dan keluar Indonesia di bidang properti), sehingga belum tergambar bagaimana pengaturannya dapat dibakukan untuk Asia Pasifik. Dalam sidang ini telah disampaikan jasa-jasa informasi yang

dapat diperoleh di Jakarta, antara lain dari Pusat Informasi Pasar BPEN dan dari Pusat Perdagangan Dunia (*World Trade Center*).

### Prioritas Bisnis untuk Meningkatkan Perdagangan Bebas

Berbagai pertanyaan diharapkan dapat terjawab dalam sidang ini antara lain apakah kalangan bisnis mendukung tujuan untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dalam APEC, bila demikian penerapannya secara penuh dalam jangka waktu berapa lama. Selanjutnya apakah wilayah perdagangan bebas tersebut berkaitan dengan kegiatan WTO, apakah prioritas bagi kalangan bisnis dari berbagai masalah yang dihadapi, serta langkah apa yang perlu segera diambil, dan bagaimana pendapat kalangan bisnis mengenai dampak tindakan pemerintah untuk mengaitkan masalah-masalah nonperdagangan dengan akses pada pasar, seperti lingkungan, hak asasi dan standar perburuhan. Pendapat yang dikemukakan dalam sidang berkisar pada manfaat perdagangan yang lebih bebas, sehingga perlu terus diusahakan, namun isu-isu nonperdagangan bila dikaitkan dengan akses pasar akan dapat menghambat perluasan perdagangan tersebut. Rupanya masyarakat bisnis masih menghadapi kesulitan dalam menentukan prioritas bersama mengingat perbedaan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi negaranya, tetapi disadari bahwa peranan fasilitasi dalam perdagangan dan investasi merupakan hal yang sangat penting.

### Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam APEC

Kegiatan APBNet apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertukaran informasi antarbisnis dan pengembangan jaringan antarUKM, dan sampai seberapa jauh APBNet dapat memberikan sumbangannya dalam harmonisasi program pengembangan UKM di wilayah ini, menjadi pokok bahasan sidang ini. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi UKM telah diidentifikasi, sekarang perlu dipikirkan bagaimana jalan keluarnya, mengingat peranan UKM yang sangat

<sup>1</sup> Rekomendasi EPG baru-baru ini telah disampaikan oleh Ketuanya kepada Ketua APEC.

<sup>2</sup> Wakil Ketua PBF memberikan keterangan kepada pers bahwa laporan PBF telah diselesaikan dan sebelum dilaporkan kepada Ketua APEC pada tanggal 15 Oktober 1994, belum dapat menjelaskan rincian isinya.

<sup>3</sup> Hasil-hasil Pertemuan APBNet ini telah dilaporkan pada SOM APEC yang diadakan di Yogya pada tanggal 12-14 September yang lalu.

besar di wilayah ini, bahkan adanya kecenderungan global untuk membentuk satuan-satuan usaha yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan besar dapat bekerja sama dengan UKM dan mencapai situasi sama-sama menang. Fokus APBNet pada UKM ini telah dinilai tepat.

#### *Sidang Kelompok*

#### *Lingkungan*

Pada tingkat kebijakan, kalangan bisnis diharapkan dapat memikirkan asas-asas untuk mendukung kebijakan yang tidak menerapkan hambatan nonperdagangan eksternal, harga yang mencerminkan biaya lingkungan yang realistis, yang diserasikan juga dengan kebijakan para mitra dagangnya, serta perjanjian internasional di bidang lingkungan yang dilaksanakan dengan cara yang cukup luwes dan mencerminkan perkembangan industri serta profil perdagangan negara yang bersangkutan. Untuk itu dipertimbangkan apakah Kelompok Kerja Lingkungan APEC perlu dibentuk. Perkembangan di bidang lingkungan telah sedemikian luas, seperti telah ditandatangani berbagai konvensi dan perjanjian-perjanjian bilateral, dan makin sulit untuk diikuti oleh kalangan bisnis. Di lain pihak masalah lingkungan akan tetap menjadi agenda di masa depan dan akan selalu menciptakan peluang-peluang tetapi juga kesulitan-kesulitan baru. Oleh karena itu, perlu dipikirkan forum dan proses yang dapat diterima oleh masyarakat bisnis dalam mengajukan pandangan-pandangannya mengenai kaitan bisnis dan lingkungan mengingat kesempatan yang terbatas pada forum global.

#### *Promosi Perdagangan dan Fasilitasi*

APBNet diharapkan dapat membantu bahkan mengarahkan APEC dalam menetapkan sasaran pada bidang-bidang prioritas yang sesungguhnya dalam memberikan fasilitasi kepada UKM, peranan yang harus dimainkan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam memberikan fasilitasi tersebut di bidang perdagangan dan investasi, serta bagaimana APBNet dapat memberikan informasi kepada APEC mengenai jangkauan jaringan serta jasa-jasa yang dapat diberikan melalui asosiasi bisnis.

#### *Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Dalam rangka SDM, masyarakat bisnis dapat menyarankan prioritas di antara berbagai kemungkinan membentuk lembaga untuk meningkatkan kaitan lembaga-lembaga SDM dengan industri, lembaga untuk mengerti perkembangan pasar teknologi, industri dan jasa, dasar-dasar untuk meningkatkan kompetensi para manajer dan karyawan, sistem pengajaran dengan bantuan komputer dan elektronik, serta persyaratan keterampilan bahasa dan budaya dalam perluasan perdagangan antarregional. Diharapkan pula pendapat sidang mengenai mekanisme konsultasi saat ini. Sehubungan dengan masalah ini, dilaporkan bahwa SOM telah menghubungi para Menteri Pendidikan APEC. Beberapa pendapat telah dikemukakan dalam sidang mengenai aspek-aspek tersebut, termasuk strategi-strategi yang telah diterapkan di bidang ini.

#### *Energi dan Infrastruktur*

APEC telah membentuk Kelompok Kerja bidang Energi serta PECC melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Minerals and Energy Forum (MEF)-PECC. Berbagai pemikiran dikemukakan untuk meningkatkan penyebaran informasi yang mendukung peningkatan kegiatan di wilayah ini serta dalam upaya harmonisasi kebijakan. Sedang dicari kelompok Pengguna Energi di wilayah Asia Pasifik sebagai mitra dialog.

APEC juga telah membentuk Kelompok Kerja di bidang transpor, bidang yang juga dibahas dalam PECC oleh Pertemuan-pertemuan Triple T (*Transportation, Telecommunications and Tourism*). Seperti di bidang energi, dipikirkan perlunya melibatkan pemakai jasa transportasi dalam konsultasi Kelompok Kerja. Dipelajari pula peranan dan manfaat privatisasi sektor transpor serta program prasarana transportasi APEC yang terintegrasi.

Kelompok Kerja Telekomunikasi APEC termasuk aktif dan telah 10 kali bersidang. Masalahnya adalah apakah prioritas-prioritasnya sudah sesuai dan apakah bisnis telah menerima cukup informasi mengenai proses ini. Selanjutnya bagaimana APBNet dapat menjalin hubungan yang

lebih strategis dengan berbagai kelompok yang sudah ada di bidang ini. APBNet mempunyai peluang dalam menyalurkan kepentingan perusahaan kecil dan menengah yang terkait.

#### **Perkembangan Selanjutnya**

Kesimpulan Pertemuan telah dirumuskan dalam suatu Pernyataan Ketua Sidang yang menyangkut berbagai masalah serta beberapa kesepakatan. Rekomendasi yang kemudian disampaikan sebagai masukan kepada APEC melalui SOM adalah sebagai berikut:

- APEC perlu mengakui bahwa sistem dan tahap perkembangan ekonomi anggota-anggotanya beraneka ragam, tetapi setiap anggota hendaknya menyatakan kesediaannya secara tegas untuk mencapai perdagangan bebas secepatnya;
- APEC hendaknya konsisten dengan ketentuan-ketentuan GATT dan terus mendukung perdagangan bebas dan regionalisme terbuka, serta tidak menghambat anggotanya, khususnya negara-negara sedang berkembang, untuk menerapkan kebijakan ekonominya dalam semangat GATT dan WTO;
- APEC hendaknya tidak mengaitkan isu non-perdagangan pada isu akses perdagangan;
- APEC perlu mempertahankan diri sebagai wadah komunikasi yang saling menguntungkan mengenai kebijakan ekonomi terbuka dan bukan wadah negosiasi, sehingga tidak tergesa-gesa menetapkan jadwal waktu formal dalam menerapkan perdagangan bebas dan asas-asas penanaman modal;
- APEC perlu memberikan ruang lingkup yang cukup luas untuk memungkinkan berlanjutnya pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi secara spontan, yang didasarkan pada asas ekonomi pasar yang terbuka;
- APBNet mendukung prioritas yang telah ditetapkan pada pertemuan para Pemimpin APEC mengenai peran serta kalangan bisnis dalam APEC, khususnya dalam mengembangkan kebijakan untuk mengembangkan usaha berskala kecil dan menengah (UKM).

Kesepakatan yang dicapai adalah (1) menyelenggarakan pertemuan kedua di Jepang pada tahun 1995, sebelum pertemuan para Pemimpin APEC diselenggarakan, (2) mengadakan sidang pada awal 1995 di Australia untuk membahas kerja sama pengembangan UKM, (3) APBNet tetap bersifat longgar, tanpa sekretariat tetap, dan berjalan berdasarkan jaringan-jaringan yang telah ada, (4) menghimbau para anggotanya untuk memberi masukan

kepada pemerintahnya masing-masing bagaimana dapat melaksanakan perdagangan yang lebih bebas dan terbuka berdasarkan kesepakatan GATT, serta menyebarluaskan gagasan APBNet di kalangan bisnis.

SOM yang menerima laporan APBNet telah menyatakan dukungannya pada setiap upaya agar jaringan tersebut menjadi wadah bagi para pengusaha, kecuali jaringan tersebut memang diperlukan untuk

menampung kepentingan bisnis, juga sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perdagangan dan industri. Diharapkan pula agar APBNet dapat menemukan mekanisme yang tepat untuk itu.

Tantangan bagi dunia bisnis saat ini adalah seberapa jauh akan melibatkan diri pada sidang para Pemimpin APEC yang akan datang ini.

#### LAMPIRAN

Di samping singkatan-singkatan yang telah mulai lazim seperti GATT, AFTA, NAFTA, beberapa singkatan lain telah digunakan dalam tulisan ini:

- PECC** Pacific Economic Cooperation Conference  
Didirikan tahun 1980 sebagai forum tripartit: pemerintah, bisnis dan kalangan akademik, untuk meningkatkan kerja sama ekonomi serta koordinasi kebijaksanaan, dan menyelenggarakan konferensi setiap 18 bulan sekali; masing-masing negara (saat ini terdiri dari 19 negara) anggotanya mempunyai sebuah sekretariat yang melayani berbagai hubungan yang diperlukan. PECC mempunyai sekretariat yang saat ini berkedudukan di Singapura.
- PBEC** Pacific Basin Economic Council  
Didirikan pada tahun 1967 oleh para bankir dan industrialis dari 5 negara industri di wilayah Pasifik untuk bekerja sama dalam masalah-masalah komersial, konsultasi mengenai perdagangan dan investasi, serta peranan sektor swasta. Telah berhasil membina jaringan informasi dan anggotanya sudah sekitar 600. Pertemuan Umum Internasional diadakan setahun sekali.
- APEC** Asia Pacific Economic Cooperation  
Suatu forum untuk pejabat-pejabat pemerintah, mula-mula dari 16 negara, diawali dengan pertemuan tingkat menteri pada tahun 1989, untuk mengadakan konsultasi secara teratur mengenai masalah-masalah ekonomi regional. APEC berapat dalam bentuk Senior Officials Meeting (SOM) serta membentuk Kelompok-kelompok Kerja (*Working Groups*). Hingga saat ini telah terbentuk 10 Kelompok Kerja di samping Kelompok-kelompok lain yang dibentuk sesuai kebutuhan. Tahun ini merupakan sidang ke-6 yang juga akan merupakan Pertemuan Pimpinan APEC (APEC Leaders Meeting, ALEM) kedua sesudah pertemuan pertama tahun lalu di Seattle, Amerika Serikat.
- CACCI** Confederation of Asia Pacific Chambers of Commerce and Industry
- EPG** Eminent Persons Group  
Dibentuk oleh APEC dan bersidang pertama kalinya pada tahun 1993. 12 orang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh dari kalangan bisnis dan penelitian. Bertugas untuk memberikan rekomendasi mengenai pola perdagangan di wilayah Asia Pasifik dalam jangka menengah serta mengenali kendala-kendalanya serta permasalahannya untuk dipecahkan oleh sidang para menteri APEC.
- CER** Closer Economic Relations  
Kerja sama untuk meningkatkan perdagangan bebas barang dan jasa serta koordinasi berbagai bidang seperti peraturan perdagangan dan kebijaksanaan persaingan, antara Australia dan Selandia Baru.
- PBF** Pacific Business Forum  
Dibentuk oleh pertemuan Pimpinan APEC di Seattle untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang harus ditangani oleh APEC untuk melancarkan perdagangan regional dan investasi serta mendorong lebih lanjut pengembangan jaringan bisnis di seluruh wilayah. PBF terdiri dari dua orang wakil yang ditunjuk untuk masing-masing mewakili bisnis kecil dan besar dari setiap anggotanya APEC.
- WTO** World Trade Organization  
Suatu organisasi perdagangan multilateral sebagai wadah satu-satunya untuk melaksanakan hubungan perdagangan hasil keseluruhan Putaran Uruguay (Perjanjian Marakesh). Organisasi yang sudah disepakati oleh GATT sejak tahun 1947 ini akan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1995, atau selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1995.

\* Dr. A.J. Surjadi adalah Faculty Member Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.